

#### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2022 Kecamatan Gedangan tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap SKPD diamanahkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut, pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban berfokus kepada kineria dan secara yang terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

LKJiP ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Gedangan dan evaluasi atas pencapaian kinerja dalam rangka menjalankan tugas penyelenggaraaan pemerintahan daerah.

Penyusunan dilakukan dengan analisa capaian kinerja dan keuangan mengacu pada Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Gedangan tahun 2022. Semoga Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

27 Februari 2023

edangan

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

O Pembina Tingkat

NIP. 19770924 199701 2 001

# **DAFTAR ISI**

KATA I	PENGANTAR	i
DAFTA	AR ISI	iii
DAFTA	AR TABEL	v
DAFTA	AR GAMBAR	vi
IKHTIS	SAR EKSEKUTIF	1
BAB I.		3
PENDA	AHULUAN	3
1.1.	KEDUDUKAN	3
1.2.	ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	7
BAB II	[	9
PERE	NCANAAN KINERJA	9
2.1.	Visi dan Misi	9
2.2.	Tujuan dan Sasaran	9
2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	10
2.4.	Perencanaan Anggaran Tahun 2022	11
BAB II	ш	15
AKUN'	TABILITAS KINERJA	15
3.1.	Pengukuran Kinerja	15
3.1.	Analisis Capaian Kinerja	16
	2.1. Sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraa	
-	merintahan kecamatan	16
	2.2. Sasaran kedua meningkatnya kualitas penyelenggaraan merintahan kecamatan	23
	Realisasi Anggaran	
	V	
	rup	
	Kesimpulan	
	Pemecahan Masalah	
	RAN – LAMPIRAN	41

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	6
Tabel 1. 2 Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah	8
Tabel 2. 1 Penjabaran Misi RPJMD Kab. Sidoarjo yang diampu Kecama	ıtan
Gedangan	9
Tabel 2. 2 Keterkaitan misi RPJMD kabupaten sidoarjo dengan rencans	a
strategis Kecamatan Gedangan	10
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Tabel 2. 4 Anggaran Kecamatan Gedangan Tahun 2022	11
Tabel 3. 2 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja	15
Tabel 3. 3 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja	16
Tabel 3. 4 Realisasi kinerja sasaran 1 Tahun 2022	17
Tabel 3. 5 Tabel Indikator Kinerja Sasaran Kesatu beserta definisi	
operasional	20
Tabel 3. 6 Realisasi kinerja sasaran 1 Tahun 2022	23
Tabel 3. 7 Tabel Indikator Kinerja sasaran kedua beserta definisi	
operasional	25
Tabel 3. 8 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa	
Timur/nasional Error! Bookmark not de	fined.
Tabel 3. 9 Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya	
Tahun 2021-2022	29
Tabel 3. 10 Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya	••
terhadap target akhir Renstra	
Tabel 3. 11 Realisasi kinerja program dan kegiatan	
Tabel 3. 12 Realisasi kinerja dan keuangan	

# **DAFTAR GAMBAR**

# **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Tahun 2022 merupakan tahun awal Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Tahun 2016 – 2022, dimana berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Gedangan Tahun 2022, disampaikan sebagai berikut:

Tabel A. 1 Ikhtisar Eksekutif

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	89.1	95.75	107.46%	Sangat berhasil

No.	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas	Nilai SKM Kecamatan	89.1	95.75	107.46	Sangat berhasil
	penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan	80	77.56	96.95	Berhasil
		Nilai RB	27.22	33,99	124.87	Sangat Berhasil
		Nilai IPP	4,51	4.16	92.24	Berhasil
		Prosentase Penyerapan Anggaran	90%	93.45%	103.83%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

#### KETERANGAN:

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Sehingga dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran pada Tahun 2022 rata – rata realisasi kinerja mencapai 107.46 % atau kategori Sangat Berhasil

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel A. 2 Kategori Pencapaian Indikator Tujuan

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Sangat berhasil

Tabel A. 3 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Nilai SKM Kecamatan	Sangat berhasil
2.	Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan	Berhasil
3.	Nilai RB	Sangat Berhasil
4.	Nilai IPP	Berhasil
5.	Prosentase Penyerapan Anggaran	Sangat Berhasil
6.	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	Sangat Berhasil

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. KEDUDUKAN

Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, dalam ketentuan tersebut menyebutkan Camat disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, juga melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat. Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati meliputi urusan pemerintahan pada bidang:

- 1. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4. Perhubungan;
- 5. Tenaga Kerja;
- 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 8. Perindustrian;
- 9. Perdagangan;
- Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- 11. Lingkungan Hidup.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Camat Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

CAMAT Sekretariat Kelompok Jabatan Sub Bagian Umum Sub Bagian Fungsional dan Kepegawaian Perencanaan Dan Keuangan Seksi Seksi Ketentraman Seksi Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Kesejahteraan Perekonomian Pembangunan Fisik

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Gedangan

Secara garis besar, untuk struktur di bawah camat mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum.
- 2) Sub Bagian Umum Kepegawaian dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan surat menyurat serta kearsipan, melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor, menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat, melaksanakan tugas yang berhubungan dengan Kepegawaian
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas: menyiapkan penyusunan perencanaan program; mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai; menyiapkan rencana kebutuhan anggaran; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya; Aspek Strategis OPD
- 4) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan.
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- 6) Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perekonomian.

- 7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- 8) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan lingkungan.

Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 23 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022.

Tabel 1. 1 Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
NO	UKAIAN	L	r	JUNLAH
1	PEJABAT STRUKTURAL	4	4	8
2	STAF /ASN	10	4	14
3	TENAGA TEKNIS / FUNGSIONAL		1	1
4	PENGAMANAN KANTOR / NON ASN	3		3
5	KEBERSIHAN DLHK / NON ASN	4		4
6	HONORER / NON ASN	7	5	12
	JUMLAH	28	14	42



Gambar 1. 2 Diagram Komposisi Aparatur Kecamatan Gedangan

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Gedangan per 31 Desember 2022 berjumlah 23 orang, dengan rincian 22 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang Calon Pegawai Negeri Sipil. Untuk menunjang pelaksanaan kinerja Kecamatan Gedangan, maka kami merekrut 19 orang pegawai Non ASN pada formasi tenaga administrasi pelayanan, tenaga administrasi keuangan, banpol PP, tenaga kebersihan.

#### 1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Permasalahan adalah pembangunan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan telah diidentifikasi yang berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. 2 Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Masih adanya pelaku usaha yang akan mengurus perizinan di Kecamatan Gedangan tidak mengetahui rencana struktur ruang Kecamatan Gedangan	Belum adanya informasi terkait rencana struktur pola ruang yang diinformasikan melalui website maupun ruang pelayanan Kecamatan	<ul> <li>a. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah</li> <li>b. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR</li> <li>c. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Gedangan</li> </ul>
	Masih adanya potensi Rumah Tinggal 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang belum memiliki izin	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan IMB	a. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB b. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah
	Masih adanya potensi pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usaha	a. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah;
- b. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR;
- c. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Gedangan;
- d. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB;
- e. kurangnya sosialisasi kepada perangkat desa terkait Indeks Desa Membangun;
- f. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengurusan perizinan usaha;
- g. Tidak semua kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat memiliki alokasi anggaran.

### **BAB II**

## PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan". Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dijelaskan adalam tabel di bawah:

Tabel 2. 1 Penjabaran Misi RPJMD Kab. Sidoarjo yang diampu Kecamatan Gedangan

Misi RPJMD Kab.	Tujuan RPJMD Kab. Sidoarjo	Sasaran RPJMD Kab.
Sidoarjo	3	Sidoarjo
Misi 1:	Tujuan 1 :	Sasaran 2 :
Mewujudkan Tata Kelola	Meningkatnya Tata Kelola	Terselenggaranya
Pemerintahan yang	Pemerintahan yang Bersih,	Tata Kelola
Bersih, Transparan dan	Transparan dan Tangkas Berbasis	Pemerintahan yang
Tangkas Melalui	Digital serta Pelayanan Publik	Bersih, Transparan
Digitalisasi untuk	Berkualitas Yang Mendukung	dan Tangkas Berbasis
Meningkatkan Kualitas	Kemudahan Berusaha.	Digital.
Pelayanan Publik dan		Nilai SAKIP
Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	Kabupaten
Misi 5 RPJMD:	Tujuan2 :	Sasaran 2 :
Mewujudkan	Menguatnya Karakter Masyarakat	Terciptanya kondisi
Masyarakat Religius	melalui Internalisasi Nilai-Nilai	Masyarakat yang
yang Berpegang Teguh	Keagamaan dan kebudayaan	aman, nyaman dan
pada Nilai-Nilai	untuk Menciptakan Ketertiban,	tentram.
Keagamaan serta	Kerukunan dan Ketenteraman	
Mampu Menjaga	dalam masyarakat.	
Kerukunan Sosial Antar		
Warga	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks Rasa Aman

## 2.2. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi, sehingga memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran dari

RPJMD. Penjelasan keterkaitan antara visi, misi dalam RPJMD dengan tujuan dan sasaran beserta Indikator kinerjanya pada Rencana Strategis Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Keterkaitan misi RPJMD kabupaten sidoarjo dengan rencana strategis Kecamatan
Gedangan

	Gedangan						
Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
RPJMD	Kab. Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Kec.	Tujuan	Strategis	Sasaran	
Kab.			Gedangan				
Sidoarjo							
Misi 1:	Tujuan 1 :	Sasaran 2 :	Meningka	Nilai	Meningk	1. Nilai SKM	
Mewujud	Meningkatnya	Terselenggaran	tnya	SKM	atnya	Kecamata	
kan Tata	tata kelola	ya pelayanan	kualitas	Kecamat	kualitas	n	
Kelola	pemerintahan	publik yang	penyeleng	an	penyele	2. Nilai	
Pemerint	yang bersih,	berkualitas	garaan		nggaraa	SAKIP	
ahan	transparan dan	dalam rangka	pemerinta		n	Kecamata	
yang	tangkas	mendukung	han		pemerin	n	
Bersih,	berbasis digital	kemudahan	kecamata		tahan	Gedangan	
Transpar	serta pelayanan	berusaha	n,		kecamat	3. Nilai RB	
an dan	publik		ketentram		an	4. Nilai IPP	
Tangkas	berkualitas yang	Nilai SAKIP	an dan			5. Prosentas	
Melalui	mendukung	Kabupaten	Ketertiba			e	
Digitalisa	kemudahan		n umum			Penyerapa	
si untuk	berusaha					n	
Meningka						Anggaran	
tkan	Indeks						
Kualitas	Reformasi						
Pelayana	Birokrasi						
n Publik							
dan							
Kemudah							
an Berusaha							
Misi 5	Tujuan2 :	Sasaran 2 :			Meningk	Dungantasa	
RPJMD:	Menguatnya	Terciptanya			atnya	Prosentase Permasalah	
Mewujudka	Karakter	kodisi			ketentra	an	
n mewujuuka	Masyarakat	masyarakat			man	trantibum	
Masyaraka	melalui	yang aman,			dan	yang	
t Religius	Internalisasi	nyaman dan			ketertib	difasilitasi	
yang	Nilai-Nilai	tenteram			an	unasmasi	
Berpegang	Keagamaan dan	terreram			umum		
Teguh	kebudayaan				amam		
pada Nilai-	untuk						
Nilai	Menciptakan						
Keagamaa	Ketertiban,						
n serta	Kerukunan dan						
Mampu	Ketenteraman						
Menjaga	dalam						
Kerukunan	masyarakat.						
Sosial							
Antar	Indeks						
Warga	Kesalehan						
	Sosial						

## 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya dengan penguatan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gedangan Berikut Perjanjian kinerja tahun 2022 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	SANGAT BAIK (89.1)
		Nilai SAKIP	A (80)
		Nilai RB	27.22
		Nilai IPP	A (4.51)
		Serapan Anggaran	90%
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi	100%

### 2.4. Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 7.132.123.376,- Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 6.490.148.295,- dengan rincian sebagai mana tabel di bawah.

Tabel 2. 4 Anggaran Kecamatan Gedangan Tahun 2022

Program	Subkegiatan	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
PROGRAM	Koordinasi dan	3.320.000	3.320.000
PENUNJANG	Penyusunan Laporan		
URUSAN	Capaian Kinerja dan		
PEMERINTAHAN	Ikhtisar Realisasi		
DAERAH	Kinerja SKPD		
KABUPATEN/KOTA			
	Evaluasi Kinerja	32.670.000	30.540.000
	Perangkat Daerah		

	2 - 10 - 1 - 110	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.549.617.410	3.282.534.237
Koordinasi dan	3.260.000	3.260.000
Penyusunan Laporan		
Keuangan Bulanan/		
Triwulanan/Semestera		
n SKPD		
Penatausahaan Barang	5.044.000	1.688.0000
Milik Daerah pada		
SKPD	14 100 045	14.050.045
Penyediaan Komponen	14.123.945	14.252.345
Instalasi		
Listrik/Penerangan		
Bangunan Kantor	100 716 000	170 001 000
Penyediaan Peralatan	180.716.008	173.291.998
dan Perlengkapan		
Kantor	100 000 000	100 === 000
Penyediaan Bahan	133.800.000	129.750.000
Logistik Kantor		
Penyediaan Barang	8.550.000	1.800.000
Cetakan dan		
Penggandaan		
Penyediaan Bahan	4.260.000	3.980.000
Bacaan dan Peraturan		
Perundang-undangan		
Fasilitasi Kunjungan	65.975.000	65.225.000
Tamu		
Penyelenggaraan Rapat	127.374.859	122.411.573
Koordinasi dan		
Konsultasi SKPD		
Pengadaan Mebel	40.345.470	40.495.220
Pengadaan Peralatan	205.672.115	246.939.653
dan Mesin Lainnya		
Penyediaan Jasa	127.400.743	149.400.743
Komunikasi, Sumber		
Daya Air dan Listrik		
Penyediaan Jasa	753.689.200	686.449.200
Pelayanan Umum		
Kantor		
Penyediaan Jasa	35.000.000	35.000.000
Pemeliharaan, Biaya		
Pemeliharaan, Pajak,		
dan Perizinan		
Kendaraan Dinas		
Operasional atau		
Lapangan		
Pemeliharaan Mebel	5.000.0000	5.000.000
Pemeliharaan	95.000.000	85.000.000
Peralatan dan Mesin		
Lainnya		
Pemeliharaan/Rehabili	130.000.000	130.000.000
tasi Gedung Kantor		
dan Bangunan Lainnya		

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	464.350.000	430.062.500
	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	59.817.530	52.880.030
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	13.500.000	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	650.281.096	362.561.796
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	215.454.000	215.454.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	107.175.000	111.925.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	59.077.000	59.077.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN	Pemeliharaan Keutuhan Negara K Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	20.825.000	20.825.000

		7.132.123.376	6.490.148.295
	Perangkat Desa		
	Tugas Kepala Desa dan		
	Fasilitasi Pelaksanaan	20.825.000	20.825.000
DESA			
PEMERINTAHAN			
PENGAWASAN	Desa		

#### BAB III

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terhadap terjadinya celah kinerja, dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

## 3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	> 90,01	Sangat Baik
2	80,01 < 90	Baik
3	70,01 < 80	Cukup
4	0 < 70,01	Kurang

Hasil pengukuran kinerja pada Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	105.072	Sangat Baik
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	100	Sangat Baik

#### 3.1. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022. Berikut analisis capaian kinerja pada Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022:

# 3.2.1. Sasaran I meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Dalam sasaran pertama untuk tahun 2022 nilai capaian kinerjanya sebesar 105.072%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran pertama kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Tabel 3. 3 Realisasi kinerja sasaran I Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	89.1	95.75	107.46%
		Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan	80	77.56	96.95%
		Nilai RB	27.22	33,99	124.87%
		Nilai IPP	4,51	4.16	92,46%
		Prosentase Penyerapan Anggaran	90%	93.45%	103.83%



Gambar 3. 1 Realisasi kinerja sasaran I

Dalam pencapaian sasaran pertama diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 5 indikator sebagai berikut:

Pada Indikator pertama **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang

diberikan oleh penyelenggaran pelayanan publik dengan tujuan utuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Berdasarkan tabel 3.3 diatas, indikator pertama yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat direalisasikan dengan baik pada tahun 2022 sebesar 95,75 melampaui dari target yang telah ditentukan yaitu 89.1;

Pada indikator kedua yaitu *Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)* yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP akan berguna untuk dapat mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan dalam pembangunan daerah. Berdasarkan tabel 3.3 di atas, indikator kedua yaitu Nilai SAKIP pada tahun 2022 memperoleh nilai 77.56 belum dapat melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80;

Pada indikator ketiga yaitu **Nilai Reformasi Birokrasi (RB)** memperoleh nilai 27.22 belum dapat melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 33.99, Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek antara lain:

- 1. Aspek Manajemen Perubahan;
- 2. Aspek Deregulasi Kebijakan;
- 3. Aspek Penataan Organisasi;

- 4. Aspek Penataan Tata Laksana;
- 5. Aspek Penataan SDM Aparatur;
- 6. Aspek Penguatan Akuntabilitas;
- 7. Aspek Penguatan Pengawasan; dan
- 8. Aspek Pelayanan Publik.

Pada Indikator keempat yaitu **Nilai Indeks Pelayanan Publik** (IPP) yang merupakan sebuah pengukuran kinerja pelayanan publik di lingkungan perangkat daerah yang didasarkan pada:

- a. Kebijakan Pelayanan (Penilaian aspek Kebijakan Pelayanan meliputi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat);
- b. Profesionalisme SDM (Penilaian aspek Profesionalisme meliputi Kompetensi, Responsivitas, Kode Etik, Pemberian Penghargaan dan Sanksi dan Budaya Pelayanan);
- c. Sarana Prasarana (Penilaian aspek Sarana Prasarana meliputi kenyamanan ruang tunggu dan fasilitas lainnya, Sarana Prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, saranan prasarana penunjang lain dan sarana front office);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (Penilaian aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik meliputi Sistem Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (Penilaian aspek Konsultasi Pengaduan meliputi ketersediaan sarana dan media konsultasi dan pegaduan, serta rubrik, dokumentasi dan publikasi konsultasi dan pengaduan yang mudah diakses);
- f. Inovasi Pelayanan (Inovasi merupakan kesatuan indikator dari berbagai prinsip. Dengan demikian inovasi merupakan upaya yang meliputi satu atau gabungan beberapa prinsip dalam satu kesatuan inovasi).

Pada tahun 2022 Kecamatan Gedangan memperoleh nilai IPP 4.16 belum dapat melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4.51;

Pada Indikator kelima yaitu **Prosentase Penyerapan Anggaran** yang dinilai berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rasio terhadap target penyerapan triwulan per jenis belanja. Pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp.7.132.123.376,- dapat terrealisasi sebesar Rp.6.490.148.295,- (93.45% dari total anggaran)

Tabel 3. 4 Tabel Indikator Kinerja Sasaran I beserta Definisi Operasional

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Cara Pengukuran
Nilai SKM Kecamatan	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.  2. Pemohon / penerima layanan mengisi kuesioner melalui website <a href="http://ikm.sidoarjokab.go.id/">http://ikm.sidoarjokab.go.id/</a> . Nilai akan otomatis generated by system.	Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman  http://ikm.sidoarjokab.go.id/.  Dengan range penilaian sebagai berikut  a.25,00 - 64,99 (D) = Tidak baik b. 65,00 - 76,60 (C) = Kurang baik c.76,61 - 88,30 (B) = Baik d. 88,31 - 100,00 (A) = Sangat baik
Nilai SKM Kecamatan	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Pemohon / penerima	Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman  http://ikm.sidoarjokab.go.id/.  Dengan range penilaian sebagai berikut  a. 25,00 - 64,99 (D) = Tidak baik b. 65,00 - 76,60 (C) = Kurang baik c. 76,61 - 88,30 (B) = Baik d. 88,31 - 100,00 (A) = Sangat

layanan mengisi kuesioner melalui website http://ikm.sidoarjokab.go.i d/. Nilai akan otomatis generated by system  Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan Gedangan  Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan  Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan  Nilai SAKIP Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.  2. Mengisi LKE dari Inspektorat  Nilai RB  Nilai RB  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  Nilai IPP  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  Nilai IPP  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  Nilai IPP  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  Nilai IPP  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  Nilai IPP  2. Mengisi LKE dari inspektorat  1. Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Penyelenggara Pelayanan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Penilain Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Penyelengara Pelayanan Penilain Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Penilain Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Penilain Kinerja Unit Penyelengara Pelayanan Penilain Kinerja		4	1 1
Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan  Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan  Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat  Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat  Nilai IPP  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Dabbit Pendayagunaan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Dabbit Pendayagunaan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Dabbit Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Dabbit Pendayagunaan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Peraturan Bupati nomor dengan range sebagai berikut:  1. AA dengan hasil nilai 80-90.  3. BB untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 0-30 Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform  Indeks penilaian sebagai berikut:  a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan		· ·	Daik
Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan  1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Dabbili Pengelenggara Pelayanan Penilain Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Perilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan			
Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan  Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat Nilai IPP  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Dashili Pendayagunaan Penary Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Dashili  Peraturan Bupati nomor dengan range sebagai berikut:  1. AA dengan hasil penilaian 90- 100 2. A untuk hasil nilai 80-90. 3. BB untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil penilaian 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil penilaian 50-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform  Intuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform  Indeks penilaian sebagai berikut: a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C - Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan			
Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat		generated by system	
Gedangan   082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat   0.2			_
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat  Nilai IPP  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Dashilit  1. Deraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Dashilit  1. Deraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penyelenggara Pelayanan Dashilit  1. Deraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penyelenggara Pelayanan Dashilit  1. Deraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penjelangara Pelayanan Penjelangara Pelayanan Dashilit		_	
Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat  Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penjelingara Pelayanan Penjelingara Pelayanan Penjelingara Pelayanan Penjelingara Penderintah Kabupaten Sidoarjo. 3. BB untuk hasil nilai 80-90. 3. BB untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30 Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform  Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform  Untuk OPD, Yang dinilai sebagai berikut : a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan	Gedangan	9	
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat  Nilai IPP  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 70-80 6. C untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 70-80 6. C untuk hasil nilai 70-80 6. C untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 60-70 6. C untuk hasil nilai 70-80 6. C untuk hasil nilai 60-70 6. C untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 60-70 6. C untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 60-70 6. C untuk hasil nilai 10-30  Untuk OPD, yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform  Indeks penilaian sebagai berikut : a.			
Kabupaten Sidoarjo.  2. Mengisi LKE dari Inspektorat  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat  Nilai IPP  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan  Pentilitati Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan  Pentilitati Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Pentilitati Indonesia Nomor 26 Tahun Pentilitati Indonesia		· ·	
2. Mengisi LKE dari Inspektorat  8. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat  Nilai IPP  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan  Penyelenggara Pelayanan  Parlili-  S. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30  Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform  Indeks penilaian sebagai berikut: a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan			
Nilai RB  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat  Nilai IPP  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penjalian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penyelenggara Pelayanan Penjalian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 30-30  Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform  Indeks penilaian sebagai berikut: a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan			
Nilai RB  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			
Nilai RB  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat  Nilai IPP  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Penshiils			
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat  Nilai IPP  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform  Indeks penilaian sebagai berikut: a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan	MII : DD	1 Danston Mantani	
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  2. Mengisi LKE dari inspektorat  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan  Penilain Menteri  a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan	Nilai RB		
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Pash lile  Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Pash lile  Birokrasi Republik Indeks penilaian sebagai berikut: a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Pash lile  Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Indeks penilaian sebagai berikut: a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) Fenilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan			
Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  2. Mengisi LKE dari inspektorat  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			penienanan dan reloim
2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  2. Mengisi LKE dari inspektorat  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Penilain Penilain Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Penilain Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Penilain Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Parabilit		<u> </u>	
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  2. Mengisi LKE dari inspektorat  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penjelajan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Reformasi Indeks penilaian sebagai berikut: a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan			
2. Mengisi LKE dari inspektorat  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik inspektorat  1. Peraturan Menteri Indeks penilaian sebagai berikut:  a. 0 – 1,00 F Gagal  b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk  c. 1,51 – 2,00 D Buruk  d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan)  e. 2,51 – 3,00 C Cukup  f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan			
Nilai IPP  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  Inspektorat  Indeks penilaian sebagai berikut:  a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan		Reformasi Birokrasi	
Nilai IPP  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		2. Mengisi LKE dari	
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		inspektorat	
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai IPP		I
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			_
Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		_	_
Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			
Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			, , ,
Penyelenggara Pelayanan f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan			·
D. 1.11-		_	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Publik	( 3
Catatan			,
nonilei Irinorie nelevronen S. 0,01 1,00 B Baix			_
nublic II. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik			
1. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima	Drogontoss	•	1. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima
Prosentase Prosentase penyerapan Penyerapan anggaran dilihat dari			
10tal Realisasi 4000/	· ·		$\%$ Penverapan = $\frac{Total\ Realisasi}{100\%}$ * 100%
Anggaran   laporan realisasi anggaran   $\%$ Penyerapan = ${Total Anggaran} * 100\%$   pada aplikasi SIKSDA	Aliggarali		Total Anggaran
siksda.sidoarjokab.go.id			

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- 1. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat dilakukan inovasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang dapat meningkatkan Indeks Pelayanan Publik melalui Jempol (Jemput Bola) Paten.
- 2. Meningkatkan kualitas SDM agar melayani masyarakat dengan optimal;
- 3. Melaksanakan koordinasi intensif dengan instansi Kelurahan terkait agenda/jadwal penyerapan anggaran;
- 4. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi secara rutin baik di internal Kecamatan, khususnya yang terkait dengan indikator penunjang sasaran utama;

Upaya mengungkit kinerja tersebut pada tahun 2022 dapat mengantarkan Kecamatan Gedangan memperoleh beberapa penghargaan, antara lain :

1. Peringkat Ketiga Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2022. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen dan kerja bersama jajaran pegawai di Kecamatan Gedangan dan sebagai salah satu bentuk konkrit dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan sasaran pertama.

#### Gambar 2.1

Dokumentasi penghargaan



# 3.2.2. Sasaran II meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Dalam sasaran kedua untuk tahun 2022 nilai capaian kinerjanya sebesar 100% Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran II kualitas Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 3. 5 Realisasi kinerja sasaran II Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100%	100%	100%



Gambar 3. 2 Realisasi kinerja sasaran II

1. Dalam pencapaian sasaran II diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 indikator. Dengan definisi operasional dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Tabel Indikator Kinerja sasaran II beserta Definisi Operasional

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Definsi Operasional	Cara Pengukuran
Prosentase Permasalaha n trantibum yang difasilitasi	Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan melalui kasi ketentraman dan	Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan Jumlah Permasalahan masalah
diadiitadi	ketertiban umum yang difasilitasi	trantibum yang difasilitasi

Target Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi di Kecamatan Gedangan pada tahun 2022 adalah 100 dengan realisasi 100 atau tercapai sebesar 100% dari target.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- Melaksanakan koordinasi dengan polsek dan koramil dalam rangka meningkatkan kondusifitas di wilayah Kecamatan Gedangan;
- 2. Melaksanakan berbagai kegiatan dan forum pertemuan berupa sarasehan, forum komunikasi dan konsultasi dengan tokoh masyarakat dan pelibatan kader trantibum;
- 3. Mengupayakan tindakan pre-emtif, preventif seperti pembinaan, sosialisasi, mediasi dan komunikasi.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi/tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal/tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

- 1. Kurang meratanya kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga beban kerja menumpuk dibeberapa orang saja khususnya terkait administrasi;
- 2. Masih adanya pelanggaran terhadap perda dan perbup yang dilakukan oleh masyarakat;
- 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keamanan lingkungan, perusakan fasum.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi/tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja belum terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

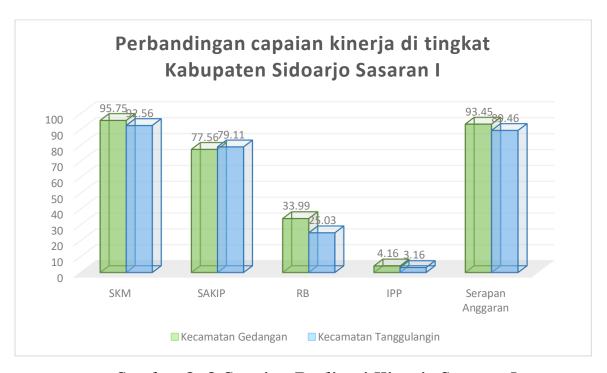
- Kurang meratanya kompetensi SDM aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga beban kerja menumpuk dibeberapa orang saja;
- 2. Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik secara daring juga membutuhkan sistem informasi yang responsif, baik dalam perihal kecepatan akses maupun kapasitas penyimpanan yang lebih besar;
- 3. Terkait anggaran terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan penyerapan secara maksimal dikarenakan terkendala faktor eksternal.

Pada Sasaran I Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada instansi sejenis di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang pada kesempatan ini melakukan perbandingan dengan Kecamatan Tanggulangin, maka capaian ini relatif lebih tinggi khususnya di 4 indikator antara lain Nilai SKM, Nilai RB, Nilai IPP dan Prosentase Penyerapan Anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang

dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja dengan instansi sejenis.

Tabel 3.7
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten Sidoarjo Sasaran I

			Realisasi	Realisasi
			Tahun 2022	Tahun 2022
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kecamatan Gedangan	Kecamatan Tanggulangin
1	Meningkatnya kualitas	Nilai Survey		
	penyelenggaraan	Kepuasan	95.75	92,56
	pemerintahan	Masyarakat (SKM)		
	Kecamatan	Nilai SAKIP	77.56	79,11
		Nilai RB	33,99	25,03
		Nilai IPP	4.16	3,16
		Prosentase		
		Penyerapan	93.45%	89,46%
		Anggaran		



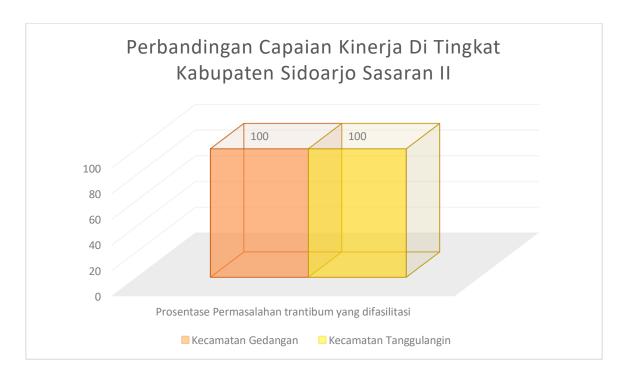
Gambar 3. 3 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran I

Pada Sasaran II Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, apabila dibandingkan Kecamatan Tanggulangin capaian ini relatif sama.

Tabel 3.8

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten Sidoarjo Sasaran II

			Realisasi	Realisasi
No	Cagaran Stratagia	Indilrator Vinaria	Tahun 2022	Tahun 2022
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kecamatan	Kecamatan
			Gedangan	Tanggulangin
1	Meningkatnya	Prosentase		
	ketentraman dan	Permasalahan	100%	100%
	ketertiban umum	trantibum yang	100%	100%
		difasilitasi		



Gambar 3. 4 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran II

Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran pertama "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan" juga mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan/penurunan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh tahun 2022 merupakan tahun pertama penerapan kinerja berdasarkan Renstra Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026,

maka ada beberapa realisasi kinerja tahun 2022 yang belum dapat dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sasaran, indikator serta target kinerja dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengikuti perubahan visi misi Kepala Daerah Terpilih. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2022:

Tabel 3. 9 Perkembangan kinerja sasaran I meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tahun 2021-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Meningkatnya kualitas penyelenggara an pemerintahan kecamatan	Nilai SKM Kecamatan Gedangan	N/A	95.75
		Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan	76.33	77.56
		Nilai RB	N/A	33.99
		Nilai IPP	N/A	4.16
		Prosentase Penyerapan Anggaran	N/A	93.45%

Grafik perkembangan kinerja sasaran pertama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 pada Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut:



#### Grafik 3.2.3

Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tahun 2021-2022

Tabel 3. 9 Perkembangan kinerja sasaran II meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tahun 2021-2022

PC113	chyclenggaraan pemerintahan kecamatan rahun 2021-2022						
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
			2021	2022			
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	N/A	100			



Grafik 3.2.3

Perkembangan kinerja sasaran kedua meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2021-2022

Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran kedua *meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum* indikator kinerja tidak dapat dilakukan perbandingan nilai yang disebabkan adanya perubahan pada Sasaran Strategis yang secara langsung merubah indikator kinerja.

Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra.

Tabel 3. 7 Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator	Target akhir	Realisasi	Persentase
	Strategis	Kinerja	Renstra	Tahun 2022	Kemajuan
1	Meningkat	Nilai SKM	89.4	95.75	107.10%
	nya	Kecamatan			
	kualitas	Gedangan			
	penyelengg				
	araan				
	pemerinta				
	han				
	kecamatan				
		Nilai SAKIP	80.4	77.56	96.47%
			00.4	77.30	90.4770
		Kecamatan			
		Gedangan			
		Nilai RB	31	33.99	109.65%
		Nilai IPP	4.65	4.16	89.46%
		Miai II I	4.03	4.10	09.40/0
		Prosentase	100%	93.45%	93.45%
		Penyerapan			
		Anggaran			

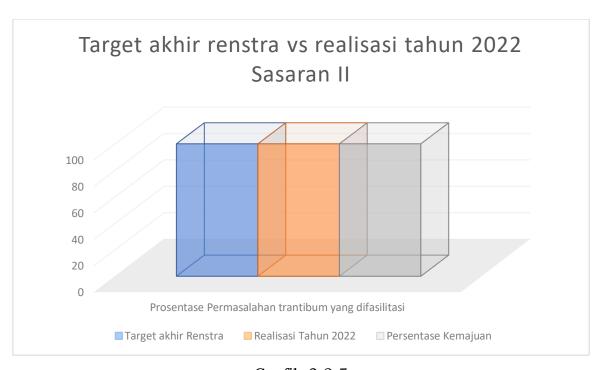


Grafik 3.2.4

Target akhir renstra vs realisasi tahun 2022 Sasaran I

Tabel 3. 10 Perkembangan kinerja sasaran kedua meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator	Target akhir	Realisasi	Persentase
	Strategis	Kinerja	Renstra	Tahun 2022	Kemajuan
1	Meningkat nya ketentram an dan ketertiban umum	Prosentase Permasalah an trantibum yang difasilitasi	100%	100%	100%



Grafik 3.2.5

Target akhir renstra vs realisasi tahun 2022 Sasaran II

Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan meningkatnya kualitas sasaran pertama pemerintahan penyelenggaraan kecamatan adalah sebesar Rp.6.162.769.295,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.841.078.955,00 Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran pertama meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Berikut rincian realisasi program/kegiatan anggaran dalam mendukung kinerja dan pencapaian pertama meningkatnya kualitas sasaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan :

Tabel 3. 8 Realisasi kinerja program dan kegiatan Sasaran I

	Program/	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l		nerja	ram dan kegiatan Sasaran I  Anggaran		
No	Kegiatan/	T. 1'1			55		
•	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Program	Tingkat kepuasan	100	100	5.216.537.969,00	5.027.812.397,00	
	Penunjang	aparatur					
	Urusan	perangkat daerah					
	Pemerintaha	terhadap					
	n Daerah	pelayanan					
	Kabupaten/	kesekretariatan					
	Kota						
2.	Program	Persentase izin	100	100	845.504.326,00	615.940.300,00	
	Penyelenggar	yang menjadi					
	aan	kewenangan					
	Pemerintaha	kecamatan yang					
	n Dan	diterbitkan					
	Pelayanan						
	Publik						
		Persentase	80	80			
		pelayanan					
		kewenangan					
		kecamatan yang					
		dilaksanakan					
		sesuai standar					
		Persentase desa	100	100			
		yang mendapat					
		pembinaan					
		tentang					
		lingkungan					
		hidup, usaha					
		ekonomi					
		masyarakat, dan					
		PKL					
3.	Program	Persentase	100	100	59.077.000,00	59.057.000,00	
	Penyelenggar	penyelenggaraan					
	aan Urusan	urusan					
	Pemerintaha	pemerintahan					
<u> </u>	I	I		l .	<u> </u>		

	Total			6.162.769.295,00	5.841.078.955,00	
		_				
		tepat waktu				
		ketentuan dan				
		sesuai dengan				
	n Desa	dan pelaporan				
	Pemerintaha	penganggaran				
	Pengawasan	perencanaan,				
	Dan	dokumen				
	Pembinaan	yang menyusun				
4.	Program	Prosentase desa	100	100	41.650.000,00	40.260.000,00
		dengan baik				
		dilaksanakan				
	n Umum	umum yang				

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

- 1. Dari hasil evaluasi pelayanan publik diperoleh informasi bahwa belum semua masyarakat mengetahui tentang beberapa perubahan/perkembangan dalam pengurusan dokumen kependudukan, sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi langsung ke masyarakat dengan langsung bekerjasama dengan Desa baik melalui on line maupun off line;
- 2. Menyusun perbaikan instrument evaluasi khususnya pelayanan publik agar dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi terkini. Digitalisasi layanan tersebut berdampak pada penyederhanaan bisnis proses dan SOP sehingga lebih mengurangi interaksi tatap muka dengan masyarakat.

Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah

alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran kedua meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum adalah sebesar Rp.327.379.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.321.690.340,00 Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran kedua meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2022. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran sasaran kedua meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 3. 9 Realisasi kinerja program dan kegiatan Sasaran II

No.	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator	Kinerja		Anggaran	
110.	Kegiatan Kegiatan		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Program	Persentase	100	100	327.379.000,00	321.690.340,00
	Koordinasi	pelanggaran				
	Ketentraman Dan	Perda dan				
	Ketertiban Umum	Perkada yang				
		ditangani				
				227 272 222 22	221 622 242 22	
Total					327.379.000,00	321.690.340,00

# 3.1. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Realisasi kinerja dan keuangan

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.216.537.969,00	5.027.812.397,00	96,38
KABUPATEN/KOTA Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3.320.000,00	3.297.500,00	99,32
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.540.000,00	30.465.700,00	99,76
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.282.534.237,00	3.156.256.842,00	96,15

ASN			
Koordinasi dan Penyusunan	3.260.000,00	3.076.000,00	94,36
Laporan Keuangan	3.200.000,00	3.070.000,00	94,50
Bulanan/Triwulanan/Semesteran			
SKPD			
Penatausahaan Barang Milik	1.888.000,00	1.700.000,00	90,04
Daerah pada SKPD			
Penyediaan Komponen Instalasi	14.252.345,00	13.698.000,00	96,11
Listrik/Penerangan Bangunan			
Kantor Penyediaan Peralatan dan	172 001 009 00	157.942.100,00	01 14
Perlengkapan Kantor	173.291.998,00	137.942.100,00	91,14
Penyediaan Bahan Logistik	129.750.000,00	124.350.000,00	95,84
Kantor	123.700.000,00	121.000.000,00	50,01
Penyediaan Barang Cetakan dan	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
Penggandaan	,	,	,
Penyediaan Bahan Bacaan dan	3.980.000,00	2.290.000,00	57,54
Peraturan Perundang-undangan			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.225.000,00	60.825.000,00	93,25
Penyelenggaraan Rapat	122.411.573,00	118.910.000,00	97,14
Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Pengadaan Mebel	40.495.220,00	39.523.000,00	97,60
Pengadaan Peralatan dan Mesin	246.939.653,00	242.700.750,00	98,28
Lainnya			
Penyediaan Jasa Komunikasi,	155.400.743,00	140.588.156,00	90,47
Sumber Daya Air dan Listrik	606 440 000 00	602 200 000 00	00.55
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	686.449.200,00	683.392.220,00	99,55
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	35.000.000,00	34.059.978,00	97,31
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	00.000.000,00	01.005.570,00	57,01
Perizinan Kendaraan Dinas			
Operasional atau Lapangan			
Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan	85.000.000,00	84.678.469,00	99,62
Mesin Lainnya	·		
Pemeliharaan/Rehabilitasi	130.000.000,00	123.258.682,00	94,81
Gedung Kantor dan Bangunan			
Lainnya	945 504 996 99	615 040 200 00	70.05
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	845.504.326,00	615.940.300,00	72,85
PELAYANAN PUBLIK			
Koordinasi/Sinergi Perencanaan	430.062.500,00	227.112.500,00	52,81
dan Pelaksanaan Kegiatan			,-
Pemerintahan dengan Perangkat			
Daerah dan Instansi Vertikal			
Terkait			
Peningkatan Efektifitas	52.880.030,00	40.494.498,00	76,58
Pelaksanaan Pelayanan kepada			
Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Pelaksanaan Urusan	0,00	0,00	#VALUE!
Pemerintahan yang terkait	3,30	0,00	
dengan Pelayanan Perizinan Non			
Usaha			
Pelaksanaan Urusan	362.561.796,00	348.333.302,00	96,08
Pemerintahan yang terkait			
dengan Kewenangan Lain yang			
Dilimpahkan			ı l

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	327.379.000,00	321.690.340,00	98,26
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	215.454.000,00	213.153.840,00	98,93
Kecamatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	111.925.000,00	108.536.500,00	96,97
Masyarakat <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>	59.077.000,00	59.057.000,00	99,97
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	59.077.000,00	59.057.000,00	99,97
Pemeliharaan Keutuhan Negara K PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	41.650.000,00	40.260.000,00	96,66
<b>DESA</b> Fasilitasi Administrasi Tata	20.825.000,00	20.225.000,00	97,12
Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.825.000,00	20.035.000,00	96,21
Surplus/Defisit	(6.490.148.295,00)	(6.064.760.037,00)	93,45

2.

### **BAB IV**

## **PENUTUP**

## 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 yaitu dari 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan telah tercapai dengan baik, namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yang dihadapi antara lain :

- Kurang meratanya kompetensi SDM aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga beban kerja menumpuk dibeberapa orang saja;
- 2. Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik secara daring juga membutuhkan sistem informasi yang responsif, baik dalam perihal kecepatan akses maupun kapasitas penyimpanan yang lebih besar;
- Terkait anggaran terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan penyerapan secara maksimal dikarenakan terkendala faktor eksternal;
- 4. Masih adanya pelanggaran terhadap perda dan perbup yang dilakukan oleh masyarakat.
- 5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.

#### 4.2. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

- Melakukan reviu terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, agar capaian yang telah dihasilkan pada Tahun 2022 dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan perjanjian kinerja Tahun 2023;
- 2. Mendorong pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana kinerja dan penganggaran, termasuk rencana aksi yang telah ditetapkan;
- 3. Mendorong koordinasi yang lebih intensif dengan melaksanakan Rapat Koordinasi rutin setiap bulan dengan jajaran Forkopimka dan instansi terkait guna menyampaikan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Gedangan dan bersama menemukan solusi guna menangani permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Gedangan;
- 4. Terus melakukan monitoring dan evaluasi atas program yang berjalan, agar program dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan target yang diharapkan;
- 5. Melakukan identifikasi secara berkala potensi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Gedangan;
- 6. Menyusun perbaikan instrument evaluasi khususnya pelayanan publik agar dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi terkini. Digitalisasi layanan tersebut berdampak pada penyederhanaan bisnis proses dan SOP sehingga lebih mengurangi interaksi tatap muka dengan masyarakat.

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
  - 1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
  - 2. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Administrator (eselon III)
  - 3. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Pengawas (eselon IV)
    https://drive.google.com/drive/folders/1nfZBosIH9IbXN90gHleXHr36nkJn3ww2?u
    sp=share\_link
- B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Dok. SK. Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1AX1k-rSylDyOUBGosIo9Tsu9ZW7205N1?usp=share\_link

C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022

Dok. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1ZOEiFW2okNUqnQv1nT\_Bg3M7QRmVkJOl?usp=share\_link

D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2022

Dokumen ambil di SKP (Screenshoot)

https://drive.google.com/drive/folders/1ZOEiFW2okNUqnQv1nT\_Bg3M7QRmVkJOl?usp=share\_link

E. Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2022

Dokumentasi Penghargaan yang diterima

 $https://drive.google.com/drive/folders/1znz7RNIibzSBslK4R5DbFzOFGVcSOQhr?usp=share\_link$